



PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI  
BADAN PENGHUBUNG DAERAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.761.419.000,00</b>	<b>1.329.250.000,00</b>	<b>75,46</b>	<b>904.800.000,00</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.761.419.000,00</b>	<b>1.329.250.000,00</b>	<b>75,46</b>	<b>904.800.000,00</b>
4.1.02	Retribusi Daerah	1.761.419.000,00	1.329.250.000,00	75,46	904.800.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>1.761.419.000,00</b>	<b>1.329.250.000,00</b>	<b>75,46</b>	<b>904.800.000,00</b>
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.761.419.000,00</b>	<b>1.329.250.000,00</b>	<b>75,46</b>	<b>904.800.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>14.649.303.574,00</b>	<b>13.922.590.945,00</b>	<b>95,03</b>	<b>20.666.579.545,00</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>14.649.303.574,00</b>	<b>13.922.590.945,00</b>	<b>95,03</b>	<b>18.489.215.009,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	7.350.900.413,00	6.904.011.883,00	93,92	6.497.236.576,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.298.403.161,00	7.018.579.062,00	96,16	11.991.978.433,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>14.649.303.574,00</b>	<b>13.922.590.945,00</b>	<b>95,03</b>	<b>18.489.215.009,00</b>
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.364.536,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	1.181.068.445,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	996.296.091,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177.364.536,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>14.649.303.574,00</b>	<b>13.922.590.945,00</b>	<b>95,03</b>	<b>20.666.579.545,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(12.887.884.574,00)</b>	<b>(12.593.340.945,00)</b>	<b>97,71</b>	<b>(19.761.779.545,00)</b>

Provinsi Jambi, 26 Agustus 2025  
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
DAERAH**

**Drs. AMRULSYAH**  
NIP.197001071991011001



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
LAPORAN NERACA  
LAPORAN OPERASIONAL  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

---

## KATA PENGANTAR

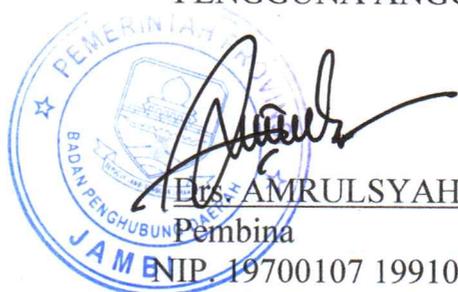
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Laporan Keuangan OPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dan guna mendukung terwujudnya Pemerintahan yang berkualitas dan Pemerintah yang bersih guna tercapainya WTP, diperlukan pengelolaan Daerah secara profesional dan transparan serta bertanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan itu sudah menjadi kewajiban bagi Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Jasa, pada akhir tahun anggaran setiap OPD menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban yang mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632).

Demikian Laporan Keuangan ini kami sampaikan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2024 dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 Maret 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
DAERAH PROVINSI JAMBI  
Selaku  
PENGGUNA ANGGARAN

  
Ets. AMRULSYAH  
Pembina  
NIP. 19700107 199101 1 001

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

---

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB KEPALA BADAN DAERAH PROVINSI JAMBI

Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Di Jakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

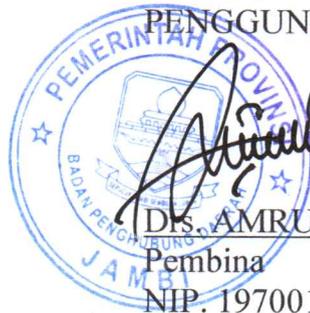
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dan isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Jakarta, 10 Maret 2025

KEPALA BADAN PENGHUBUNG  
DAERAH PROVINSI JAMBI

Selaku

PENGGUNA ANGGARAN



DIS. AMRULSYAH

Pembina

NIP. 19700107 199101 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR LAMPIRAN	
<b>I IBAB I PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuanagan OPD	
1.3 Sistimatika Penulisan Catatanatas Laporan Keuangan	
<b>II BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD</b>	<b>9</b>
2.1 Kebijakan Keuangan	
2.2 Pencapaian Kinerja	
<b>III BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD</b>	<b>11</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD	
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah ditetapkan	
<b>IV BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	<b>13</b>
4.1 EntitasAkuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan	
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada dalam SAP pada OPD	
<b>V BAB V PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN KEUANGAN OPD</b>	<b>17</b>
5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan	
5.1.1 Pendapatan	
5.1.2. Belanja	
5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	
5.2.1 Aset	
5.2.2 Kewajiban	
5.2.3 Ekuitas	
5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Lampiran Operasional	
5.3.1 Pendapatan	
5.3.2 Beban	
5.3.3. Surplus/Depisit	
5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	
<b>VI BAB VI PENUTUP</b>	<b>32</b>

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

---

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Capaian Target Kinerja APBD OPD	9
Tabel 2	Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan	11
Tabel 3	Pagu Anggaran Badan Penghubung Daerah TA 2024	17
Tabel 4	Perbandingan Pendapatan Tahun 2024 dan 2023	18
Tabel 5	Rincian Anggaran Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2024	18
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023	19
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024	20
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023	20
Tabel 9	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa	21
Tabel 10	Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023	22
Tabel 11	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024	23
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023	23
Tabel 13	Rincian Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023	24
Tabel 14	Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran TA 2024 dan 2023	25
Tabel 15	Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2024 dan 2023	25
Tabel 16	Rincian Beban dibayar dimuka Tahun 2024 dan 2023	26
Tabel 17	Rincian Persediaan Tahun 2024 dan 2023	26
Tabel 18	Rincian Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023	27
Tabel 19	Mutasi nilai Peralatan dan Mesin	27
Tabel 20	Mutasi nilai Gedung dan Bangunan	28
Tabel 21	Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan	28
Tabel 22	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024	29
Tabel 23	Rincian Utang Belanja dan Jasa Kantor	29
Tabel 24	Pendapatan Operasional	30

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD.

Maksud :

Adapun maksud dari Penyusunan Laporan Keuangan OPD adalah sebagai Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran OPD pada tahun pelaporan dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tujuan :

Secara umum tujuan dari Laporan Keuangan OPD adalah untuk memberikan informasi tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2024 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 1.329.250.000,- mencapai 75,46 % dari anggaran sebesar Rp. 1.761.419.000,-

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 13.922.590.945,- atau mencapai 95,04% dari anggaran sebesar Rp. 14.649.303.574,-.

b. Laporan Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2024 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 45.332.434.045,88 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 207.578.684,84 investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00 aset tetap sebesar Rp. 45.124.855.361,04 dana cadangan Rp.0,00 dan aset lainnya sebesar Rp 0.00 Jumlah kewajiban per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 124.431.396,00 yang terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 124.431.369,00 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp.0,00. Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 45.208.002.649,88.

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

### c. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 1.320.650.000,00 dan jumlah Beban Operasional adalah sebesar Rp. 13.864.255.752,97 sedangkan jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebesar 1.910.008.260,81 sehingga terdapat surplus/defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (14.453.614.013,78)

### d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai Ekuitas awal, Surplus/Defisit- LO, koreksi-koreksi dan Ekuitas Akhir.

EKUITAS AWAL sebesar Rp. 44.652.022.194,93 SURPLUS/DEFISIT-LO (Rp. 14.453.614.013,78), DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR terdiri dari : KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP Rp. 0.00, LAIN-LAIN Rp. 2.416.253.523.73 dan EKUITAS AKHIR sebesar Rp. 45.208.002.649,88.

### e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Laporan Operasional, pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

### 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OPD Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi, disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 35 Tahun 2012, Perubahan Kedua Pergub Nomor 02 Tahun 2013 dan Perubahan Ketiga Pergub Nomor 34 Tahun 2013;

### **1.3 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.**

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain :

- a. Informasi umum tentang entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro
- c. Informasi pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

**BAB II****KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD OPD****2.1 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi meliputi berbagai aspek dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Pengelolaan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi meliputi sisi Pendapatan dan Pengeluaran. Penerimaan meliputi aspek Pendapatan Retribusi Pemakaian Ruangan, Restribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dan Restribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sedangkan Pengeluaran meliputi aspek Belanja Operasi dan Belanja Modal

**2.2 Pencapaian Target Kinerja APBD OPD**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2024 Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi mempunyai 2 (Dua) Program dimana dari masing-masing Program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
<b><i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</i></b>	<b><u>14.157.700.334,00</u></b>	<b><u>13.445.634.445,00</u></b>	<b>94,97 %</b>
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<u>7.610.100.413,00</u>	<u>7.163.211.883,00</u>	94,13 %
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	205.500.000,00	<u>193.577.838,00</u>	94,20 %
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<u>1.939.250.123,00</u>	<u>1.861.707.505,00</u>	96,00 %
Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>2.931.596.753,00</u>	<u>2.896.567.998,00</u>	98,81 %

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

---

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<u>1.471.253.045,00</u>	<u>1.330.569.221,00</u>	90,44%
<b><i>Program Pelayanan Penghubung</i></b>	<b><u>491.603.240,00</u></b>	<b><u>476.956.500,00</u></b>	<b>97,02 %</b>
Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	<u>491.603.240,00</u>	<u>476.956.500,00</u>	97,02 %
<b><i>JUMLAH</i></b>	<b><u>14.649.303.574,00</u></b>	<b><u>13.922.590.945,00</u></b>	<b>95,04 %</b>

**BAB III****IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD****3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi TA 2024 ditetapkan sebesar Rp. 1.761.419.000,00 untuk Pendapatan, dan Rp. 14.649.303.574,00 untuk Belanja Daerah, yang terdiri dari Rp. 14.649.303.574,00 untuk Belanja Operasi dan untuk Belanja Modal Rp. 0.00

Realisasi target kinerja keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2024 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut :

Tabel 2  
Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja Keuangan  
Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi  
Tahun 2024

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
<b>Pendapatan</b>	<u>1.761.419.000,00</u>	<u>1.329.250.000,00</u>	(432.169.000,00)
<b>Belanja</b>	<u>14.649.303.574,00</u>	<u>13.922.590.945,00</u>	(726.712.629,00)
<b>Belanja Operasi :</b>	<b>14.649.303.574,00</b>	<b>13.922.590.945,00</b>	<b>(726.712.629,00)</b>
- Belanja Pegawai	<u>7.350.900.413,00</u>	<u>6.904.011.883,00</u>	(446.888.530,00)
- Belanja Barang dan Jasa	<u>7.298.403.161,00</u>	<u>7.018.579.062,00</u>	(279.824.099,00)
<b>Belanja Modal</b>			
<b>Surplus/Defisit</b>	<u>(12.887.884.574)</u>	<u>(12.593.340.945)</u>	(1.158.881.629)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, secara umum realisasi Pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi sebesar Rp.1.329.250.000,00,- dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.761.419.000,00. Sedangkan realisasi Belanja sebesar Rp. 13.922.590.945,00 dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 14.649.303.574,00. selisih lebih/kurang sebesar Rp. (726.712.629,00) untuk

anggaran belanja daerah, dan surplus/defisit sebesar Rp. (432.169.000,00) untuk pendapatan.

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan**

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi masih adanya kegiatan yang tidak terealisasi. beberapa hambatan atau kendala adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan  
dalam hal ini Retribusi Pemakaian Ruangan dan Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila terdapat hambatan atau kendala yang disebabkan belum adanya renovasi kamar secara menyeluruh, dan persaingan dengan keberadaan hotel hotel dikawasan Jakarta Pusat, yang meliputi persaingan harga, pelayanan dan fasilitas yang lebih lengkap.
2. Belanja  
dalam hal ini belanja operasi menyesuaikan dengan kebutuhan dan harga pada tahun yang berjalan.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, aturan-aturan dan praktek-praktek yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

#### 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi disusun dengan mengacu pada Format yang disajikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 tentang standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri dalam Negeri Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Entitas Akuntansi adalah unit Pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi menerapkan basis akruwal dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akruwal adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Proses penerapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan adalah pengukuran laporan keuangan. Dasar

pengukuran yang diterapkan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dan ekuitas dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban .

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

##### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

- Laporan Realisasi Anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut:
  - a. Pendapatan
  - b. Belanja
- Dalam Laporan Realisasi Anggaran, jenis pendapatan asli daerah berupa pendapatan retribusi daerah, sedangkan jenis belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi dan belanja modal. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal terdiri dari peralatan dan mesin.
- Akuntansi Anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian oleh manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan dan belanja.
- Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan dan anggaran belanja.
- Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan menjadi alokasi estimasi pendapatan.
- Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.
- Pendapatan diakui paada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya.
- Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum daerah.

- Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengeluarannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi
- Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai denganklasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama.

### 2. Neraca

- Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (akhir tahun anggaran)
- Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan aset tetap serta mengklasifikasikan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam neraca.
- Neraca mencantumkan pos-pos sebagai berikut :
  - a. ASET
  - b. KEWAJIBAN
  - c. EKUITAS

#### a. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat ekonomi dan sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat.

##### Aset Lancar

- Aset Lancar adalah Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai dalam waktu 12 belas bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar pada neraca meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

##### Aset tetap

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

- Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan- irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksidalampekerjaan dan akumulasi penyusutan.

### **b. KEWAJIBAN**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban Jangka Pendek

- Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara sama seperti aset lancar.
- Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

### **c. EKUITAS**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

## BAB V

### PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 merupakan pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari :

Pagu Anggaran Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 14.649.303.574,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3

Uraian		Jumlah Pagu	
No.Urut	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>13.375.580.780,00</b>	<b>14.649.303.574,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	6.891.977.619,00	7.350.900.413,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.483.603.161,00	7.298.403.161,00
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>310.000.000,00</b>	
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	310.000.000,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.375.580.780,00</b>	<b>14.649.303.574,00</b>

#### 5.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

##### 5.1.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.329.250.000,00 dari sebesar Rp. 1.761.419.000,00. Keseluruhan Pendapatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi merupakan Pendapatan Retribusi Daerah.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 415.850.000,00 atau 45,96 % persen dibandingkan realisasi Pendapatan Retribusi TA 2023 sebesar Rp. 904.800.000,00 dari target sebesar Rp. 1.319.800.000,00. Kenaikan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Ruang dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa disebabkan Pemerintah Pusat telah menghapuskan PPKM di Jakarta sehingga tingkat okupasi Mess mengalami kenaikan.

Perbandingan realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada tabel 4 berikut ini :

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 4  
Perbandingan Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	TA 2024	TA 2023	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah :				
• Retribusi Pemakaian Ruangan	81.150.000	61.900.000,00	19.250.000	31,10%
• Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	1.239.500.000	842.900.000,00	396.600.000	47,09%
<b>JUMLAH</b>	<b>1.329.250.000</b>	<b>904.800.000</b>	<b>415.850.000</b>	<b>45,96%</b>

### 5.1.2 Belanja

Realisasi belanja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar Rp. 13.922.590.945,00 atau 95,04 % persen dari anggaran sebesar Rp. 14.649.303.574,00.

Menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Tahun 2024

Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi Belanja	% Realisasi
No.Urut	Uraian	Rp	Rp	
5.1	BELANJA OPERASI			
5.1.1	Belanja Pegawai	<u>7.350.900.413,00</u>	<u>6.904.011.883,00</u>	93,92%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	<u>7.298.403.161,00</u>	<u>7.018.579.062,00</u>	96,17%
5.2	BELANJA MODAL			
5.2.2				
5.2.3				
<b>JUMLAH</b>		<b>14.649.303.574,00</b>	<b>13.922.590.945,00</b>	<b>95,04%</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi belanja Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 6.743.988.600,00 dibandingkan realisasi belanja TA 2023 disebabkan adanya refocusing anggaran kegiatan. Perbandingan realisasi belanja Tahun 2024 dan Tahun 2023 disajikan pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6  
Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2024 dan 2023

Jenis Belanja		Realisasi		Naik/Turun	
No Urut	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Naik/Turun	%
5.1.1	Belanja Pegawai	6.904.011.883,00	6.497.236.576,00	406.775.307	6,26%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.018.579.062,00	11.991.978.433,00	(4.973.399.371,00)	(41,47)%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan Mesin		2.177.364.536,00	(2.177.364.536,00)	(100,00%)
<b>JUMLAH</b>		<b>13.922.590.945,00</b>	<b>20.666.579.545,00</b>	<b>(6.743.988.600,00)</b>	<b>(23.63)%</b>

### 5.1.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar Rp. 6.904.011.883,00 dan Tahun 2023 sebesar Rp. 6.497.236.576,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 disajikan pada tabel 7 berikut

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.736.240.012	3.323.771.671	88,96
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.453.380.401	3.418.960.212	99,00
Belanja Tambahan Penghasilan pertimbangan objektif ASN	161.280.000	161.280.000	100
<b>JUMLAH</b>	<b>7.350.900.413,00</b>	<b>6.904.001.883,00</b>	<b>93,92%</b>

Realisasi belanja pegawai Tahun 2024 sebesar Rp. 6.904.011.883,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat kenaikan Belanja Pegawai sebesar Rp. 406.775.307,00 disebabkan karena adanya penambahan pegawai pada Badan Penghubung Daerah Provinsi.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 8 berikut ini :

Tabel 8

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	(Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan	3.323.771.671,00	3.157.292.923,00	166.478.748,00	5.27
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.418.960.212,00	3.339.943.653,00	79.016.556 ,00	7.88
Objektif lainnya	161.280.000,00	170.730.000	( 9.450.000,00)	(5,54)
<b>JUMLAH</b>	<b>6.904.001.883,00</b>	<b>6.497.236.576,00</b>	<b>406.775.307,00</b>	<b>6,26</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 5.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024...sebesar Rp. 7.018.579.062,00 dan Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 11.991.978.433 Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 disajikan pada tabel 9 berikut ini :

Tabel 9  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Barang	1.088.401.706,00	1.000.333.126,00	91,91
Belanja Jasa	4.610.661.015,00	4.424.151.271,00	95,95
Belanja Pemeliharaan	707.055.005,00	701.809.230,00	99,26
Belanja Perjalanan Dinas	892.285.435,00	892.285.435,00	100
<b>JUMLAH</b>	<b>7.298.403.161,00</b>	<b>7.018.579.062,00</b>	<b>96,17</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 sebesar Rp. 7.018.579.062,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat penurunan realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 4.973.399.371,00 atau 41,47 % persen, disebabkan karna adanya refocusing.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 10 berikut ini :

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 10  
Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa  
Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/turun	
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Rp	%
Belanja Bahan Pakai Habis	<u>1.000.333.126</u>	2.476.706.394,00	<u>(1.476.373.268,00)</u>	(59,61)
Belanja Jasa Kantor	<u>4.424.151.271</u>	4.606.040.029,00	<u>(375.466.596,00)</u>	(8.15)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	<u>193.577.838</u>	187.033.914,00	<u>6.543.924,00</u>	<u>3.50</u>
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	108.365.000,00	<u>(108.365.000,00)</u>	(100,00)
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	<u>1.650.000</u>	0,00	1.650.000,00	100,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0,00	2.000.000,00	<u>( 2.000.000,00)</u>	(100,00)
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	0,00	221.010.990,00	<u>(221.010.990,00)</u>	(100,00)
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	36.000.000,00	<u>(36.000.000,00)</u>	(100,00)
Belanja Pemeliharaan Peralatan Mesin	<u>355.931.430</u>	678.483.540,00	<u>(322.552.110,00)</u>	(47,54)
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	<u>344.227.800</u>	2.321.704.958,00	<u>(1.977.477.158,00)</u>	(85,17)
Belanja Perjalanan Dinas	<u>892.285.435</u>	1.322.633.608,00	<u>(430.348.173,00)</u>	(32,54)
Belanja Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0,00	32.000.000,00	0,00	(100,00)
<b>JUMLAH</b>	<u><b>7.018.579.062</b></u>	<b>11.991.978.433</b>	<u><b>(4.903.399.371,00)</b></u>	<b>(41,13)</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

### 5.1.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00. / Nihil.

Tabel 11  
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	0,00	0,00	0.00
	0,00	0,00	0.00
	0,00	0,00	0.00
	0,00	0,00	0.00
<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 terdapat penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 2.177.364.536 atau 100% persen. Perbedaan tersebut disebabkan karena Tahun 2024 tidak terdapat kegiatan Belanja Modal Bangunan dan Gedung Kantor sebagaimana terdapat pada tabel 12.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023 disajikan pada Tabel 12 berikut ini :

Tabel 12  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi		Naik/Turun	
	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Rp	%
Belanja Modal Alat Kantor		133.760.000,00	133.760.000,00	(100)
Belanja Modal Alat Studio		52.170.000,00	52.170.000,00	(100,00)
Belanja Modal Peralatan Pemancar		15.375.000,00	15.375.000,00	(100,00)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga		828.715.895,00	828.715.895,00	(100,00)
Belanja Modal Komputer Unit		86.750.000,00	86.750.000,00	(100,00)
Belanja Modal Peralatan Komputer		64.297.550,00	64.297.550,00	(100,00)

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Belanja Modal Bangunan Gedung		996.296.091,00	996.296.091,00	(100,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>2.177.364.536,00</b>	<b>(2.177.364.536,00)</b>	<b>(100,00)</b>

### 5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

#### 5.2.1 ASET

##### 5.2.1.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 207.578.684,84 dan Rp. 138.369.505,81. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel 13 berikut ini :

Tabel 13  
Rincian Aset Lancar Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas di Bnd Penerimaan	0,00	0,00
2	Piutang Retribusi Daerah	17.300.000,00	25.900.000,00
3	Penyisihan Piutang	17.300.000,00	25.402.500,00
4	Beban dibayar dimuka	135.868.838,84	121.117.884,00
5	Persediaan	71.709.846,00	16.754.121,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>207.578.684,84</b>	<b>138.369.505,81</b>

##### 5.2.1.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran

Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 atau NIHIL.

Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 14 sebagai berikut :

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 14

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Kas di Bendahara	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Kas	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.2.1.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 17.300.000,00 dan Rp. 25.900.000,00. Piutang Pendapatan Tahun 2024 berkurang Rp. 8.600.000,00 dari Tahun 2023, dikarenakan adanya cicilan piutang pendapatan.

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 15 sebagai berikut :

Tabel 15

Rincian Piutang Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang Pendapatan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Bill Tagihan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	17.300.000,00	25.900.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>17.300.000,00</b>	<b>25.900.000,00</b>

### 5.2.1.1.3 Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 135.868.838,84 dan Rp.121.117.884,00 Beban dibayar dimuka merupakan pengeluaran atas belanja premi asuransi barang milik daerah berupa belanja jasa asuransi bangunan gedung mess/kantor dan belanja jasa asuransi kendaraan dinas roda 4.

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 16 sebagai berikut :

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 16  
Rincian Beban dibayar dimuka Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Beban dibayar dimuka	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Belanja jasa asuransi bangunan gedung mess/kantor dan kendaraan dinas roda 4	135.868.839,84	121.117.884,81
	<b>JUMLAH</b>	<b>135.868.839,84</b>	<b>121.117.884,81</b>

### 5.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 71.709.846,00 dan Rp. 16.754.121,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional mess/kantor.

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel 17 sebagai berikut :

Tabel 17  
Rincian Persediaan Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Alat Tulis Kantor	1.782.242,00	8.410.300,00
2	Kertas dan Cover	5.815.800,00	-
3	Bahan Cetak	12.177.570,00	173.000,00
4	Alat Listrik	1.239.416,00	1.483.520,00
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	50.694.818,00	6.687.301,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>71.709.846,00</b>	<b>16.754.121,00</b>

### 5.2.1.2 Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 45.124.855.361 dan Rp. 44.626.712.598. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas bulan). Rincian Aset Tetap pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel 18 berikut ini :

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Tabel 18  
Rincian Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

No	Jenis Aset Tetap	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	15.593.523.221,70	15.593.523.221,70
3	Gedung dan Bangunan	59.116.986.664,00	59.116.986.664,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.410.000,00	184.410.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	384.185.292,00	384.185.292,00
6	Akumulasi Penyusutan	(30.154.249.816,66)	(30.652.392.579,58)
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.124.855.361,04</b>	<b>44.626.712.598,12</b>

## 5.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 15.593.523.221,70 dan Rp. 15.593.523.221,70

Sedangkan nilai buku Peralatan dan Mesin yaitu nilai perolehan dikurangi dengan Akumulasi Penyusutannya adalah sebesar Rp. 1.991.467.355,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan pada sebagai berikut :

Tabel 19

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	15.593.523.221,70
2	Mutasi Kurang /Tambah '-Pengembangan Nilai Aset	0,00
3	Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	15.593.523.221,70
4	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(13.602.055.866,00)
5	Nilai Buku Per 31 Desember 2024	1.991.467.355,00

Mutasi kurang peralatan dan Mesin sebesar Rp. 0,00/NIHIL merupakan pengembangan Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Pengadaan, Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin.

## 5.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 59.116.986.664,00 dan Rp. 59.116.986.664,00

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (16.417.591.950,00 ) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan Rp.42.699.394.714,00

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan pada sebagai berikut :

Tabel 20

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	59.116.986.664,00
2	Mutasi Kurang/Tambah '-pengembangan nilai aset	0,00
3	Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	59.116.986.664,00
4	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(16.417.591.950,00)
5	Nilai Buku Per 31 Desember 2024	42.699.394.714,00

### 5.2.1.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 184.410.000,00 dan Rp. 184.410.000,00 . Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp. ( 134.602.000,00 ) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp. 49.808.000,00

Mutasi nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan pada sebagai berikut :

Tabel 21

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	184.410.000,00
2	Mutasi Tambah	0,00
3	Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	184.410.000,00
3	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024	(134.602.000,00)
4	Nilai Buku Per 31 Desember 2024	49.808.000,00

### 5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 384.185.292,00 dan Rp. 384.185.292,00 Jumlah tersebut merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan tapi dikelompokkan dalam aset tetap lainnya yang tidak disusutkan

### 5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. (30.154.249.816,66) dan Rp. (30.652.392.579,58)

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel 22 berikut ini :

Tabel 22  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Peralatan dan Mesin	15.593.523.221,70	( 13.602.055.866 )	1.991.467.355,00
2	Gedung dan Bangunan	59.116.986.664,00	( 16.417.591.950 )	42.699.394.714,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.410.000,00	( 134.602.000 )	49.808.000,00
	<b>Nilai Buku</b>	<b>74.894.919.885,00</b>	<b>(30.154.249.816,66)</b>	<b>44.740.669.969,00</b>

### 5.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 2.222.410.803,35,- dan Rp. 2.222.410.803.35

### 5.2.2 KEWAJIBAN

#### 5.2.2.1 Utang Belanja Jasa Kantor

Nilai kewajiban Jangka pendek dalam hal ini utang belanja jasa kantor per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 124.431.396,00 dan Rp. 113.059.909,00 Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal dilaporkan.

Rincian Utang Belanja Jasa Kantor per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan Pada tabel 23 sebagai berikut :

Tabel 23  
Rincian Utang Belanja dan Jasa Kantor

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Belanja Telepon	<u>153.422,00</u>	<u>335.025,00</u>
Belanja Air	<u>137.112,00</u>	<u>1.348.212,00</u>
Belanja Listrik	<u>124.140.862,00</u>	<u>111.376.672,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>124.431.396,00</u></b>	<b><u>113.059.909,00</u></b>

## 5.2.3 EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 42.799.851.626,00 dan Rp. 44.652.022.194,00 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## 5.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

### 5.3.1 Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.329.250.000,00 dan Rp. 904.800.000,00 Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Pendapatan Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan dan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. Jika realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, tidak terdapat selisih sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 24

Uraian	Realisasi Menurut		Naik/Turun Rp
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan- Retribusi Daerah	1.320.650.000,00	1.329.250.000,00	8.600.000,00

### 5.3.2 Beban Operasi

#### 5.3.2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.904.011.883,00 dan Rp. 6.497.236.576,00 kenaikan sebesar Rp. 406.775.307,00.

#### 5.3.2.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.960.243.869,00 dan Rp. 9.562.371.720,00 penurunan sebesar Rp. (2.602.127.851,00)

#### 5.3.2.2 Beban Penyisihan Piutang

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2024 sebesar Rp. (8.102.500,00)

### 5.3.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.910.008.260,00 dan Rp. 2.011.628.467,00 penurunan sebesar Rp. 101.620.07,00

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2024**

---

### **5.3.3.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Jumlah Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 1.001.119.304,00 dan Rp. 948.681.075,00 Kenaikan sebesar Rp. 52.438.228,00.

### **5.3.3.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Jumlah Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 902.055.955,00 dan Rp. 1.056.114.391,00 Penurunan sebesar Rp. (154.058.435,00).

### **5.3.3.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

Jumlah Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 6.833.000,00 dan Rp. 6.833.000,00 Kenaikan/Penurunan sebesar Rp. 0,00.

### **5.3.3.4 Surplus/Depisit**

Surplus/Defisit dari kegiatan Operasional Tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar minus Rp. (14.445.511.512,00) dan minus Rp. (17.166.436.764,00). Defisit sebesar Rp. 2.720.925.251,00 / (15,85).

## **5.4 Penjelasan Atas PosPos Laporan Perubahan Ekuitas**

### **5.4.1 Ekuitas Awal**

Jumlah Ekuitas Awal per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 44.652.022.194,93 dan Rp. 37.309.210.415,76.

### **5.4.2 Surplus/Depisit LO**

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar minus Rp. (14.453.614.013,78) dan minus Rp. (17.166.436.764,44).

### **5.4.3 RK PPKD**

Jumlah RK PPKD yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.593.340.945,00 dan Rp. 19.761.779.545,00

### **5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar dalam kategori Lain - Lain yang berakhir 31 Desember 2024 Rp. 2.416.253.532,73 dan 2023 sebesar Rp. 4.747.468.998,61.

### **5.4.5 EKUITAS AKHIR**

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 45.208.002.649,88 dan Rp. 44.652.022.194,93.

## BAB VI PENUTUP

Dalam pencapaian target kinerja Tahun 2024, Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dari segi pendapatan retribusi masih mengalami hambatan disebabkan banyak menjamurnya hotel-hotel disekitar Mess Badan Penghubung Daerah Provinsi dengan persaingan harga dan berlakunya edcost pada perjalanan dinas luar daerah Pegawai Negeri Sipil masih berdampak pada hunian Mess Jambi di karenakan pegawai yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah khususnya ibu kota Jakarta sudah jarang menginap pada Mess Jambi, serta dikarenakan sarana dan prasarana Mess/Kantor yang masih belum memadai dan perbaikan kamar belum menyeluruh. Namun berbagai usaha untuk mengatasi hambatan tersebut sudah dilakukan baik dalam bentuk himbauan dan promosi ke Kabupaten dan Kota SeProvinsi Jambi dan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor: 92/SE/GUB.BAPEGDAPROV-1/IV/2022 tentang Menggunakan Fasilitas Penginapan Milik Pemerintah Provinsi Jambi di Jakarta.

Dari sisi Belanja target kinerja mengalami penurunan dari tahun lalu, tahun ini sebesar 95,04% ( Belanja Operasi 95,04 % dan Belanja Modal 0,00 %) dan sisa lebih pembiayaan anggaran 4,96% yang tidak tercapai, hal hanya diakibatkan adanya pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan dan harga.

Untuk itu badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Tupoksi dan Rencana Strategi Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi di Jakarta, pelaksanaan semua aspek kinerja selalu berupaya melakukan kerjasama dan koordinasi yang maksimal.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 disampaikan sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban OPD untuk dapat dijadikan bahan/materi dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024.



**PEMERINTAHAN PROVINSI JAMBI**  
**BADAN PENGHUBUNG DAERAH**  
**NERACA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**  
**1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024**



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>45.331.530.283,88</b>	<b>44.765.082.103,93</b>
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>207.578.684,84</b>	<b>138.369.505,81</b>
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	17.300.000,00	25.900.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(17.300.000,00)	(25.402.500,00)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	135.868.838,84	121.117.884,81
1.1.12	Persediaan	71.709.846,00	16.754.121,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>207.578.684,84</b>	<b>138.369.505,81</b>
<b>1.3</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>45.123.951.599,04</b>	<b>44.626.712.598,12</b>
1.3.02	Peralatan dan Mesin	15.165.410.445,70	15.593.523.221,70
1.3.03	Gedung dan Bangunan	59.116.986.664,00	59.116.986.664,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.410.000,00	184.410.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	384.185.292,00	384.185.292,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(29.727.040.802,66)	(30.652.392.579,58)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>45.123.951.599,04</b>	<b>44.626.712.598,12</b>
1.5.04	Aset Lain-lain	2.065.019.803,35	2.222.410.803,35
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(2.065.019.803,35)	(2.222.410.803,35)
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH PROPERTI INVESTASI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>45.331.530.283,88</b>	<b>44.765.082.103,93</b>
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>124.431.396,00</b>	<b>113.059.909,00</b>
<b>2.1</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>124.431.396,00</b>	<b>113.059.909,00</b>
2.1.06	Utang Belanja	124.431.396,00	113.059.909,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>124.431.396,00</b>	<b>113.059.909,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>124.431.396,00</b>	<b>113.059.909,00</b>
<b>3</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>45.300.603.663,88</b>	<b>44.652.022.194,93</b>
<b>3.1</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>45.300.603.663,88</b>	<b>44.652.022.194,93</b>
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(14.453.614.013,78)	(17.166.436.764,44)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	12.593.340.945,00	19.761.779.545,00
	<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>45.300.603.663,88</b>	<b>44.652.022.194,93</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>45.425.035.059,88</b>	<b>44.765.082.103,93</b>

Provinsi Jambi, 26 Agustus 2025  
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH**

**Drs. AMRULSYAH**  
NIP.197001071991011001